

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah proses PKPA di Apotek Alba Medika yang dilaksanakan pada tanggal 23 September-26 Oktober 2024 dapat disimpulkan bahwa:

1. Selama proses PKPA di Apotek Alba Medika dapat membantu calon Apoteker untuk mengetahui peran, tugas, fungsi serta tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Selama proses PKPA di Apotek Alba Medika dapat membantu calon Apoteker untuk menambah wawasan dan pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan kefarmasian di apotek secara profesional sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Selama proses PKPA di Apotek Alba Medika dapat membantu calon Apoteker untuk mengetahui strategi dan kegiatan kefarmasian untuk pengembangan praktik kefarmasian komunitas
4. Selama proses PKPA di Apotek Alba Medika membantu calon apoteker untuk lebih peka terhadap berbagai kasus yang terjadi di apotek serta meningkatkan kesadaran mereka tentang peraturan hukum yang berkaitan dengan kesehatan, terutama yang berlaku di lingkungan apotek.

#### **5.2 Saran**

Berikut adalah beberapa saran setelah melaksanakan PKPA di Alba Medika:

1. Calon apoteker disarankan untuk mempersiapkan diri secara matang sebelum memulai PKPA.

2. Calon apoteker diharapkan dapat memperdalam pengetahuan terkait penggunaan obat, efek samping, serta mekanisme kerja obat.
3. Calon apoteker sebaiknya mempersiapkan diri dengan optimal untuk memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta layanan swamedikasi yang efektif kepada pasien, dengan menyampaikan informasi yang jelas, akurat, sesuai literatur, dan mudah dipahami oleh pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

- American Pharmacist Association, 2012, *Drug Information Handbook 21st Edition*, Lexicomp.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2023, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam*, Jakarta
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2019, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional*, Jakarta
- BNF, 2020, *British National Formulary 78 September 2019-Maret 2020 edition*, BMJ Group and Pharmaceutical Press, London.
- BNFC, 2020, *British National Formulary for Children 2020-2021*, BMJ Group and Pharmaceutical Press, London, London.
- Brayfield, A., 2014, *Martindale the Complete Drug Reference 36th Edition*. Pharmaceutical Press, London.
- Departemen Kesehatan RI. 2007, *Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- McEvoy, Gerald K., et al., 2011, *AHFS Drug Information*, America Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta: Republik Indonesia.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta: Republik Indonesia.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*, Jakarta: Republik Indonesia.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2022, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan, Pembatasan, dan Kategori Obat*, Jakarta: Republik Indonesia.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2023, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika*, Jakarta: Republik Indonesia.

MIMS, 2021, MIMS Indonesia, <https://www.mims.com/indonesia> [online], Diakses pada November 2024.

Presiden Republik Indonesia, 2023, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan*, Jakarta.

Presiden Republik Indonesia, 2024, *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan*, Jakarta.